



HARYADI/PONTIANAKPOST

PEMERIKSAAN BPK: Petugas BPK RI Kalbar memeriksa penyelenggara pemilu tingkat kelurahan dan kecamatan di Pontianak Utara terkait penggunaan keuangan yang digunakan dalam Pileg dan Pilpres 2014, kemarin (1/9) di Aula Kantor Camat Pontianak Utara.

Persoalkan Pajak Honor Petugas

BPK Periksa PPS dan PPK

PONTIANAK—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara pemilu, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait penggunaan anggaran Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Senin (1/9).

Dalam pemeriksaan yang dilakukan tim audit BPK RI Perwakilan Kalbar di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, seorang anggota KPPS sempat tidak terima dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, lantaran dianggap menuduh adanya penyimpangan anggaran.

Beny Prasetyo mengatakan bahwa pihak BPK mempertanyakan yang mengarah kepada kecurigaan bahwa anggaran pemilu yang disalurkan kepada PPK dan PPS itu tidak jelas. "Honor yang kami terima sudah jelas, yakni Rp400 ribu per bulan," katanya usai memberikan keterangan.

Dia mengungkapkan ada pun uang tambahan sebesar Rp750 ribu digunakan untuk membeli bahan material untuk tempat pemungutan suara, seperti terpal, triplek dan keperluan lainnya. "Sebenarnya yang dipermasalahkan itu adanya pemotongan pajak untuk honor yang kami terima," ucapnya.

Sementara itu, Ketua PPK Pontianak Utara, Muhlis mengatakan bahwa anggaran yang disediakan KPU untuk pelaksanaan pileg dan pilpres masing-masing sebesar

Rp1,127 miliar lebih dan Rp912 juta lebih. "Anggaran itu diperuntukan untuk kegiatan pelaksanaan pemilu, mulai dari honor, uang makan, sewa tenda dan keperluan lainnya," katanya.

Adapun pemeriksaan yang dilakukan BPK, dia menambahkan terkait dengan pendistribusian anggaran tersebut, apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. "Saya tegaskan bahwa anggaran sudah disalurkan dengan baik, bukti-bukti penggunaan uang dibuktikan dengan kuitansi," tegasnya.

Dia menegaskan bahwa seluruh anggaran yang telah dikucurkan KPU Kota Pontianak telah didistribusikan tepat waktu sesuai dengan alokasinya. "Begitu uang diambil, langsung kami distribusikan kepada jajaran, sehingga tidak sempat nginap di PPK," ucapnya. (adg)